

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

a) Pada Triwulan I tahun 2025, sektor pangan Kabupaten Malang menunjukkan dinamika fluktuasi. Dari hasil pemantauan harga 20 komoditas pangan pokok, mayoritas mengalami stabilitas harga yang relatif terjaga. Namun, terdapat sejumlah komoditas yang menunjukkan gejolak harga cukup tajam, khususnya pada kategori hortikultura dan protein hewani.

b) Pada bulan Februari 2025, terjadi penurunan harga pada beberapa komoditas pangan utama antara lain daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah merah, bawang putih. Penurunan harga ini terlihat cukup signifikan pada beberapa jenis bahan pokok, yang kemungkinan dipengaruhi oleh menurunnya permintaan pasca libur akhir tahun 2024 namun kembali mengalami kenaikan harga menjelang Ramadhan pada bulan maret 2025 dan idul Fitri pada April 2025.

c) Tingkat fluktuasi harga tertinggi adalah bawang merah yang melonjak hingga 34%, disusul oleh cabai rawit dengan fluktuasi sebesar 33,3%. Kenaikan ini sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi, pola panen yang tidak merata di sentra produksi utama dan meningkatnya permintaan menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H;

d) Sementara itu, daging ayam ras (5,8%), udang (5,6%), dan cabai merah (4,7%) mengalami fluktuasi sedang, mencerminkan dinamika pasokan atau permintaan musiman. Komoditas seperti daging sapi dan bawang putih menunjukkan fluktuasi rendah di bawah 3%.

e) Adapun 10 komoditas dengan harga stabil antara lain beras medium, minyak goreng, tepung terigu, tempe, tahu, dan beberapa produk susu serta makanan instan.

f) Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar bahan pokok tetap stabil, beberapa komoditas segar terutama sayur dan protein hewani menunjukkan ketidakstabilan yang perlu monitor dan evaluasi lebih lanjut.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dari hasil mengidentifikasi, berbagai kendala yang dihadapi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malang dalam pelaksanaan strategi pengendalian inflasi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) periode Triwulan I Tahun 2025. Permasalahan utama meliputi dampak perubahan cuaca terhadap produksi dan distribusi komoditas pangan dan hortikultura, kerusakan infrastruktur akibat banjir pada akhir tahun 2024 yang menyebabkan penurunan hasil pertanian, serta fluktuasi harga bahan pokok Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

Selain itu, pengembangan sektor UMKM dan IKM masih memerlukan dukungan berupa akses permodalan, pelatihan teknologi, serta fasilitas untuk perluasan pasar, termasuk pasar internasional. Pengawasan terhadap stok dan distribusi bahan pokok belum optimal, khususnya di wilayah yang rawan keterlambatan distribusi. Di sisi lain, fluktuasi harga pada komoditas pangan sering kali tidak mencerminkan kondisi riil pasokan dan permintaan, akibat pengaruh mekanisme pasar yang tidak sepenuhnya seimbang.

Meskipun koordinasi dan diskusi lintas sektor telah rutin dilakukan, efektivitas penerapan kebijakan di lapangan masih perlu ditingkatkan. Hasil identifikasi menunjukkan pentingnya penguatan sinergi antarinstansi, pemanfaatan teknologi yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta penyusunan strategi jangka panjang yang lebih integratif dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Malang.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Ketersediaan

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan ketersediaan pasokan pangan, Pemerintah Kabupaten Malang pada Triwulan I Tahun 2025 melaksanakan berbagai program strategi lintas sektor bersama pemerintah pusat, TNI-Polri, swasta, dan masyarakat. Kegiatan meliputi penanaman jagung serentak, panen padi dan edamame, penguatan P2L, pengembangan demplot padi Inpari 32, pengendalian hama tikus, vaksinasi ternak, penebaran benih ikan, inovasi garam tunnel, serta pemeliharaan jaringan irigasi. Penguatan juga dilakukan pada infrastruktur pendukung seperti embung, jalan usaha tani, dan distribusi benih hortikultura.

2. Keterjangkauan

Untuk menjaga keterjangkauan harga dan memperkuat daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malang selama Triwulan I Tahun 2025 melakukan berbagai upaya strategis, antara lain Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah Lebaran yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar, serta program Ramadhan Vaganza yang menawarkan hampers sembako murah. Pemerintah Kabupaten Malang juga melakukan sidak dan pengawasan keamanan pangan di pasar dan gudang distributor, serta pendampingan distribusi Minyakita agar harga sesuai HET, pemantauan harga dan pasokan dilakukan di 21 pasar. Penguatan daya beli juga didorong melalui bantuan permodalan kepada koperasi dan UMKM, serta sosialisasi ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja.

3. Kelancaran Distribusi

Pada Triwulan I Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Malang mengintensifkan berbagai upaya untuk mendukung kelancaran distribusi dan mobilitas masyarakat. Bupati Malang meninjau kerusakan Jembatan Kali Sumber Andong dan meresmikan jembatan penghubung di Lawang dalam program Sambang Desa, serta menerima bantuan CSR berupa arm roll truck dari Bank Jatim untuk mendukung pengelolaan sampah. Program Angkutan Mudik Gratis diluncurkan guna memfasilitasi perjalanan Lebaran warga kurang mampu. Dinas Perhubungan melaksanakan koordinasi pengamanan lalu lintas, rampcheck kendaraan dinas, dan pemeliharaan rambu jalan. Dinas PU Bina Marga menangani 33 kegiatan perbaikan jalan strategis, sementara Dinas Perumahan dan Cipta Karya meningkatkan akses jalan permukiman di 194 lokasi. Di sektor distribusi logistik, dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap penyaluran pupuk dan LPG bersubsidi oleh Dinas Pertanian dan Bagian SDA Setda melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar penyaluran tepat sasaran dan mendukung stabilitas ekonomi daerah.

4. Komunikasi Efektif

Pemerintah Kabupaten Malang mengintensifkan komunikasi efektif melalui berbagai forum

koordinasi dan kegiatan sinergis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan. Program Sambang Desa Gotong Royong (Samdesgotro) dilaksanakan di 33 kecamatan sebagai sarana dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat guna menyusun pembangunan yang inklusif, mengembangkan potensi desa, dan meninjau layanan dasar. Pengendalian inflasi dilakukan secara intensif melalui High Level Meeting TPID di tingkat kabupaten dan provinsi, serta Capacity Building bersama Bank Indonesia guna memperkuat sinergi pusat-daerah menuju ketahanan pangan. Pemerintah juga aktif dalam rapat koordinasi nasional secara daring dengan Kemendagri dan melaksanakan updating data harga sembako harian melalui sistem SISKAPERBAPO dan SIHARKEPO. Inspektorat Daerah Kabupaten Malang turut mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan rutin data harga dan upaya pengendalian inflasi ke laman resmi Kemendagri.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a) Upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam menjaga ketersediaan komoditas pangan strategis telah menunjukkan pendekatan yang inklusif dan multisektor, mencakup intensifikasi produksi pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan TNI/Polri dan pelaku usaha. Namun demikian, tantangan perubahan iklim dan anomali cuaca menuntut penguatan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis data agroklimat dan prediksi cuaca untuk memitigasi risiko gagal panen serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Di samping itu, percepatan hilirisasi hasil pertanian melalui pengembangan industri olahan dan rumah produksi di desa-desa menjadi prioritas penting guna menstabilkan pasokan, mengurangi food loss, serta meningkatkan nilai tambah petani secara berkelanjutan.

b) Pada aspek keterjangkauan harga, program seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah Ramadan, dan distribusi Minyakita terbukti berhasil meredam gejolak harga di tingkat konsumen, khususnya pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional. Namun ke depan, dibutuhkan perluasan jangkauan program melalui digitalisasi sistem distribusi dan pemesanan. Pemanfaatan platform e-commerce lokal berbasis BUMDes, atau pengembangan aplikasi pemesanan sembako murah terintegrasi dengan data harga pangan (misalnya melalui integrasi dengan SIHARKEPO), akan memungkinkan intervensi harga lebih merata hingga ke wilayah terpencil, terutama yang menghadapi tantangan keterisolasian geografis atau minim akses pasar.

c) Kelancaran distribusi pangan di Kabupaten Malang telah ditopang oleh intervensi infrastruktur seperti rehabilitasi dan peningkatan jaringan jalan strategis yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Malang, mencerminkan respons perencanaan yang cukup baik dalam mendukung rantai pasok. Namun demikian, mengingat luas dan variasi topografi wilayah Kabupaten Malang, dibutuhkan penguatan basis data supply chain pangan yang didukung Sistem Informasi Geografis (GIS). Pemetaan berbasis GIS memungkinkan identifikasi bottleneck distribusi secara presisi, terutama di wilayah-wilayah dengan akses terbatas atau rawan bencana, dan dapat

d) Dari sisi komunikasi, pendekatan Pemkab Malang melalui forum koordinasi TPID, program Sambang Desa dan Gotong Royong (Samdesgotro), dan pelaporan harga harian melalui sistem SIHARKEPO mencerminkan upaya membangun transparansi dan partisipasi publik dalam pengendalian inflasi. Namun, efektivitas komunikasi akan semakin kuat bila dikombinasikan dengan transformasi digital yang lebih luas. Pengembangan aplikasi TPID mobile, dashboard

harga real-time yang mudah diakses masyarakat, serta pelibatan media lokal dalam kampanye edukatif mengenai pola konsumsi bijak dan pemanfaatan pangan lokal dapat meningkatkan literasi masyarakat sekaligus memperkuat kontrol sosial terhadap dinamika harga.

e) Distribusi pupuk bersubsidi masih menghadapi hambatan terkait ketidakakuratan data dalam sistem e-RDKK, meskipun koordinasi dan pemutakhiran data telah diupayakan bersama penyuluh dan kios pupuk. Sementara itu, distribusi LPG bersubsidi juga mengalami tantangan berupa keterbatasan stok dan distribusi yang belum sepenuhnya merata. Pembatasan pembelian menggunakan KTP serta pengajuan tambahan kuota telah diterapkan sebagai langkah mitigasi, namun pengawasan di lapangan masih perlu diperkuat.

f) Program permodalan Triwulan I 2025 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang berhasil menyalurkan Rp 1.513.000.000,- kepada 52 koperasi dan 2 UMKM sebagai stimulan produktivitas, dengan dukungan sinergi dana BLU/D. Namun masih terdapat kendala kredit macet dan penyerapan program dana bergulir dengan bunga rendah bagi UMKM dan Koperasi masih belum maksimal, sehingga perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam seleksi penerima, didukung sistem scoring kredit berbasis data dan optimalisasi sosialisasi program sampai tingkat desa melalui aparaturnya kecamatan dan stakeholder untuk meningkatkan efektivitas program permodalan.

g) Penurunan hasil pertanian di Kabupaten Malang pada Triwulan I Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh jaringan irigasi yang belum berfungsi optimal. Hal ini disebabkan kerusakan tanggul dan bendungan akibat banjir di beberapa lokasi pada akhir tahun 2024. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan perbaikan infrastruktur irigasi yang rusak dan penguatan upaya mitigasi bencana agar pasokan air untuk pertanian tetap terjaga. mendukung kebijakan zonasi logistik pangan yang adaptif.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a) **Penguatan hilirisasi dan industri pengolahan pangan lokal** perlu dipercepat untuk mengurangi ketergantungan pasokan luar daerah dan meredam fluktuasi harga saat panen raya. Pemerintah Kabupaten Malang dapat mendorong pengembangan industri pengolahan skala kecil-menengah berbasis potensi lokal melalui rumah produksi desa, kios pangan, dan fasilitas pascapanen seperti pengering, pengemasan, dan pengolahan makanan.

b) **Transformasi digital sektor pangan** penting untuk efisiensi distribusi dan keterjangkauan harga. Pemkab Malang perlu mengembangkan sistem logistik berbasis data harga harian, peta produksi, dan jaringan distribusi melalui dashboard terpadu yang terintegrasi dengan SIHARKEPO dan GIS. Di hilir, perlu didorong marketplace pangan lokal berbasis BUMDes atau koperasi untuk mempertemukan petani, UMKM, dan konsumen secara digital.

c) Pengendalian inflasi tidak hanya berbasis intervensi struktural, tetapi juga membutuhkan peningkatan kapasitas sosial melalui literasi ekonomi dan pangan. **Pemkab Malang dapat mendorong pelatihan terpadu bagi Kelompok Wanita Tani (KWT), pelaku UMKM, dan pemuda desa** tentang produksi efisien, manajemen distribusi, serta pemahaman tentang dinamika harga dan inflasi pangan.

d) Sebagai upaya perlindungan sosial dan stabilisasi harga, Pemkab Malang perlu memperluas

jangkauan program keterjangkauan pangan ke seluruh wilayah khususnya desa-desa yang masih mengalami keterbatasan akses distribusi dan pasar. **Inovasi seperti mobile market, pasar murah keliling, dan distribusi sembako bersubsidi berbasis data kemiskinan dan geospasial** dapat menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pangan terjangkau.

e) Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi, diperlukan sinkronisasi data penerima pupuk dan LPG bersubsidi melalui integrasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga penyaluran dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, implementasi sistem pemantauan distribusi secara digital di tingkat kecamatan perlu dilakukan guna memastikan transparansi, akurasi data, serta pengawasan yang lebih optimal terhadap alur distribusi subsidi di lapangan